

KAJIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SMA BATIK 1 SURAKARTA

Dynna Sri Wulandari¹, Baskoro Adi Priyatno², Maridi³

¹Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia
ds.wulandari@student.uns.ac.id

^{2,3}Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia

Abstrak

Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu, maka ditetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Standar Nasional Pendidikan di SMA Batik 1 Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data diperoleh dengan wawancara. Hasil penelitian terdapat temuan gap pada standar isi sebesar 1,42%, standar proses sebesar 2,36%, standar kelulusan sebesar 1,42%, standar pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 0,94%, standar sarana dan prasarana sebesar 4,72%, standar pengelolaan sebesar 0%, standar pembiayaan sebesar 0,94%, dan standar penilaian sebesar 3,77%.

Kata Kunci: SNP, Kualitatif, Kuantitatif

Pendahuluan

Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk itulah setiap sekolah (penyelenggara pendidikan) wajib menjamin mutu pendidikan. Agar terjaga mutu pendidikan, maka disusunlah Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sehingga dapat dikatakan bahwa SNP sebagai acuan mutu pendidikan (Peraturan Pemerintah no.32 tahun 2013).

Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 lebih lanjut menjelaskan bahwa SNP digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Hal ini dilakukan guna mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang memiliki keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa yang memiliki akhlak mulia, sehat, terampil,

bermartabat, kreatif dan innovative (Undang-undang RI no.20 tahun 2003). Standar Nasional Pendidikan menengahkan mencakup 8 standar, yaitu kompetensi lulusan, isi, proses, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian. Standar kompetensi lulusan sebagai dasar penyusunan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana serta standar pembiayaan.

Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan, maka dalam hal ini sekolah melakukan kontrol mutu (*quality control*), jaminan mutu (*quality assurance*) dan mutu terpadu (*total quality*). Menurut Aokland (1996) dalam Fitra dkk. (2018) mengatakan bahwa mutu adalah adanya keunggulan produk atau jasa. Macdonald (1996) dalam Fitra dkk. (2018) mengatakan

bahwa mutu adanya kesesuaian antara produk dengan persyaratannya. Untuk menjaga mutu, maka perlu diadakan kontrol mutu, yaitu kegiatan pendeteksian dan pengeliminasian produk-produk gagal, yaitu produk-produk yang tidak sesuai dengan persyaratannya atau standar (Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, 2012), lebih lanjut menjelaskan bahwa kontrol mutu dengan dilaksanakannya ujian sumatif, ujian akhir, ujian sekolah. Fitra dkk. (2018) peningkatan mutu memerlukan perencanaan (plan) dan komitmen pada pencapaian visi, misi dan tujuan.

Menurut Fitra, dkk. (2018), bahwa Penjaminan mutu meliputi penetapan dan pemenuhan standar manajemen mutu, sehingga kepuasan stakeholder merupakan salah satu indikator keberhasilan mutu. Untuk mencapai hal itu perlu adanya pelaksanaan system penjaminan mutu internal. Menurut Penjaminan Mutu Pendidikan (2012), jaminan mutu merupakan usaha agar tidak dihasilkan produk cacat atau salah dari sejak awal proses. Dengan terlaksananya jaminan mutu, maka dapat menumbuhkan budaya mutu. Suatu budaya yang terus menerus menjaga produk yang bebas cacat. Menurut Indriasari dkk. (2018) hal ini dilakukan untuk mendapat kepercayaan masyarakat. Agar kepercayaan meningkat maka perlu peningkatan kinerja yang spesialisasi jenis pekerjaannya dan adanya interaksi antar anggota. Dengan adanya spesialisasi maka dapat menghemat waktu, biaya tenaga dan pikiran. Handayani (2016) mengatakan bahwa, kemampuan guru dalam proses pendidikan sangat menentukan keberhasilan untuk

mencapai tujuan pendidikan. Karena guru menyusun rencana, melaksana rencana dan mengevaluasi kesesuaian antara hasil capaian dengan rencana. Abdi dan Ananiah (2017) menambahkan bahwa untuk memunculkan keunggulan siswa dengan menerapkan model pembelajaran menyenangkan, inovatif dan kreatif serta sekolah menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Untuk mencapai 8 Standar Nasional Pendidikan, sekolah melibatkan komite dan stakeholder yang kompeten untuk mengembangkan sekolah.

Sehubungan dengan kontrol mutu, penjaminan mutu maka terciptalah budaya mutu (Penjaminan Mutu Pendidikan, 2012). SMA Batik 1 Surakarta adalah salah satu sekolah swasta yang berada dalam naungan Yayasan Pendidikan Batik. Sekolah ini mendapat kepercayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan jumlah siswa sebanyak 1234 siswa. Sekolah ini berusaha untuk meningkatkan mutu. Sehubungan dengan hal itu, peneliti melakukan kajian delapan Standar Nasional Pendidikan di sekolah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Standar Nasional Pendidikan SMA Batik 1 Surakarta.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data diperoleh dengan wawancara tentang pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di SMA Batik 1 Surakarta pada pejabat yang berwenang dan guru. Data yang terkumpul dikonversi, sehingga diperoleh data kuantitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peningkatan mutu lembaga pendidikan dapat dilihat dari pemenuhan SNP yang terdiri atas 8 standar. Data penelitian diperoleh dengan pengisian instrumen Standar Nasional Pendidikan. Penilaian ini pada 8 standar, yaitu isi, proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, dan 8) standar penilaian. Hasil observasi disajikan pada pada tabel 1 dan gambar 1.

Tabel 1. Nilai SNP dan gap SNP

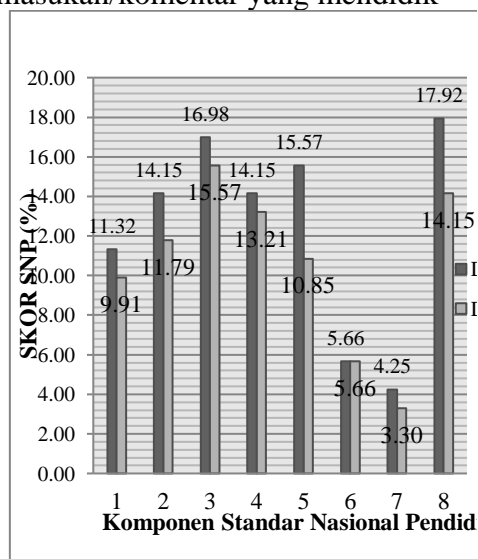
SNP	Data Ideal	Data Real	Gap data ideal dengan data real (%)
Standar Isi	11.32	9.91	1.42
Standar Proses	14.15	11.79	2.36
Standar kelulusan	16.98	15.57	1.42
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.15	13.21	0.94
Standar Sarana dan Prasaran	15.57	10.85	4.72
Standar Pengelolaan	5.66	5.66	0.00
Standar pembiayaan	4.25	3.30	0.94
Standar Penilaian	17.92	14.15	3.77
TOTAL	100	82.55	17.45

Berdasarkan tabel 1 dan gambar 1 menunjukkan bahwa sekolah masih ada gap pada beberapa standar. Gap yaitu suatu kondisi adanya perbedaan antara kondisi standar dengan kondisi riil. Gap tersebut pada standar isi sebesar 1,42%, standar proses sebesar 2,36%, standar kelulusan sebesar

1,42%, standar pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 0,94%, standar sarana dan prasarana sebesar 4,72%, standar pengelolaan sebesar 0%, standar pembiayaan sebesar 0,94%, dan standar penilaian sebesar 3,77%. Gap yang besar pada standar proses, standar sarana dan prasarana, serta standar penilaian. Gap standar proses sebesar 2,38%. Gap standar sarana dan prasarana sebesar 4,72%. Gap standar penilaian sebesar 3,77%.

Standar isi terdapat temuan bahwa sebagian silabus disusun oleh guru sendiri, penugasan terstruktur dan tidak terstruktur sebanyak 2-3 kali dalam sebulan dan KKM 75. Standar proses terdapat temuan bahwa guru menggunakan RPP yang sudah tersedia, guru melakukan remediasi tes (*bukan remedial teaching*), guru menggunakan IT sebanyak 2-3 kali sebulan. Pada standar kelulusan terdapat temuan bahwa rata-rata siswa yang tuntas pada ulangan harian secara umum kurang dari 70%. Standar pendidika dan tenaga kependidikan terdapat temuan ijazah kepala sekolah strata 2, guru hadir 80-100% karena adanya penugasan guru dari kepala sekolah. Pada standar sarana dan prasarana terdapat temuan bahwa luas ruang laboratorium kurang mencukupi jumlah siswa untuk satu kelas, ruang laboratorium mengalami alih fungsi, luas lahan kurang sesuai dengan jumlah siswa. Pada standar pembiayaan bahwa sekolah tidak membelajarkan 100% bahan atau alat habis pakai. Karena sebagian untuk perawatan alat-alat investaris, penggajian sebab tempat penelitian adalah sekolah swasta. Pada standar

penilaian terdapat temuan bahwa kurang dari 50% guru menyusun soal tes tingkat C4-C6, kurang dari 50% guru mata pelajaran mengolah dan menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar, dan guru <50% memberikan balikan hasil kerja siswa disertai masukan/komentar yang mendidik



Gambar 1. Grafik penilaian data ideal dan data real SNP SMA Batik 1 Surakarta

Keterangan:

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kelulusan
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan data, maka dapat disimpulkan bahwa kajian SNP SMA Batik 1 Surakarta adalah: Gap tersebut pada standar isi sebesar 1,42%, standar proses sebesar 2,36%, standar kelulusan sebesar 1,42%, standar pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 0,94%,

standar sarana dan prasarana sebesar 4,72%, standar pengelolaan sebesar 0%, standar pembiayaan sebesar 0,94%, dan standar penilaian sebesar 3,77%.

Rekomendasi untuk memperbaiki dalam rangka pemenuhan SNP adalah:

1. Sebaiknya guru mengembangkan silabus dan RPP sendiri yang disesuaikan dengan kondisi sekolah.
2. Dalam pengembangan RPP ada kesesuaian antara kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, model pembelajaran, instrumen evaluasi.
3. Guru menyusun indikator pencapaian kompetensi sesuai kompetensi dasar.
4. Guru menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran yang bervariasi, menyenangkan, menantang dan aktif.
5. Guru mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar.
6. Guru mengembangkan instrumen penilaian yang secara bertahap mengacu pada C3-C6
7. Guru melatih siswa untuk berpikir kritis dan penyelesaian masalah,
8. Perlu penyediaan ruang gudang.
9. Perlu perluasan ruang laboratorium yang menampung seluruh siswa dan sesuai standarnya.
10. Untuk pembelajaran yang sulit perlu diulang-ulang agar siswa paham.

Daftar Pustaka

- Fitra, Muh., Ruslan, Hendra. (2018). Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu* vol. 4 no.1. hal 76-86

Indriasari, I., Setiawan, D.F., Nugraha, A.E.P. (2018), Integrasi Anggota Tim Kerja SMK Terakreditasi A dan C Dalam Memenuhi Standar Nasional Pendidikan, *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, Vol.6. No.2 (2018). hal. 39-47

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan dasar dan Menengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan. (2012). Pedoman Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional